

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan dengan akal yang sempurna untuk berpikir, merasakan sesuatu, melakukan kegiatan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Namun, jika akal yang sempurna tersebut tidak diasah dan digunakan dengan baik, maka akal yang dimiliki akan rusak dan mati. Untuk mengasah dan mempertajam akal, setiap manusia harus merasakan pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.² Pendidikan hadir untuk melatih daya pikir, memperbaiki moral, serta meningkatkan keterampilan seseorang agar terus

¹ Abdul Kadir dan Ahmad Fauzi, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 59.

² *Ibid*, hal. 62.

berkembang dan menjadi lebih baik. Di dalam dunia pendidikan, pendidikan terbagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.³ Secara umum, contoh pendidikan formal di Indonesia dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat, dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan

³ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (PT Imperial Bhakti Utama, 2007), hal. 17.

keterampilan fungsional dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat suatu kesamaan yang dimiliki oleh pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang yang dikemas dalam sebuah manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 12, yaitu peserta didik, guru, pengguna jasa pendidikan, silabus, sumber daya manusia, sumber belajar, metode pengajaran, alat/media/buku pelajaran, dana, fasilitas, sumber dana dan fasilitas, serta tujuan pendidikan.⁵ Dalam sebuah lembaga pendidikan atau organisasi, sumber daya manusia merupakan aset terpenting untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan adalah guru. Menurut Ngalim Purwanto, guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seorang atau kelompok orang, sedangkan guru sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa terhadap masyarakat dan negara.⁶ Guru sebagai profesi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 39 ayat (2): “Pendidik

⁴ *Ibid*, hal. 11.

⁵ Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 7.

⁶ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan dan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Rosda Karya, 1995), hal. 138.

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan....”⁷. Pada hakikatnya, guru adalah seseorang yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan yang diperoleh peserta didik.

Guru sebagai orang yang digugu dan ditiru tentunya harus mempunyai seperangkat pengetahuan, kemampuan, serta perilaku yang baik dalam menjalankan tugas profesional. Seperangkat pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki oleh guru disebut dengan kompetensi. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.⁸ Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Substansi dari PP No. 19 tahun 2005 dalam Pasal 28 (3) menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

⁷ Jejen Musfah, *Redesain Pendidikan Guru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 3.

⁸ Penelitian *Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)* yang ditulis oleh Badrun Kartowagiran, Universitas Negeri Yogyakarta

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.⁹ Empat standar kompetensi tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru untuk menjadi guru profesional.

Namun, kenyataan menunjukkan kualitas guru masih tergolong relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal dan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, nilai rata-rata nasional hanya menempati angka 44,5 jauh dari nilai standar 75.¹⁰ Bahkan, nilai dari kompetensi pedagogik tidak memuaskan. Masih terdapat banyak guru yang belum bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru cenderung pasif dan minim kreatif dalam kegiatan belajar di kelas. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Blazely pada tahun 1997, pembelajaran di sekolah cenderung teoretik dan tidak terkait dengan lingkungan dimana anak belajar. Hal ini berdampak pada peserta didik yang tidak mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Di samping itu, dari 3,9 juta guru yang tersedia di Indonesia, terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi

⁹ Rusdiana dan Yeti Heryati, *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 86.

¹⁰ <https://news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru> (diakses pada 26 Agustus 2018, pukul 21:09)

akademik, serta 52% guru belum mempunyai sertifikat profesi. Hal yang patut dipertanyakan adalah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru? Terdapat empat faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya kompetensi guru, yaitu: (1) masih banyak guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, (2) kualifikasi guru yang belum setara sarjana, (3) program peningkatan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru yang rendah, dan (4) rekrutmen guru yang tidak efektif. Rendahnya kompetensi guru berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Menurut UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report tahun 2016, data memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia hanya menempati urutan ke 10 dari 14 negara berkembang di dunia. Sedangkan kualitas guru di Indonesia menempati urutan ke 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hal ini diperkuat dengan indikator rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yang dilansir oleh Tim Broad-Based *Broad-Based Education (BBE)* Depdiknas (Tim BBE, 2002: 1) yaitu: (1) NEM Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah relatif rendah dan tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, (2) adanya keluhan dari dunia usaha bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik, (3) adanya ketidakpuasan yang berjenjang, dimana pihak SLTP merasa bekal

lulusan SD kurang baik untuk memasuki SLTP, kalangan Sekolah Menengah merasa bekal lulusan SLTP tidak siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, demikian juga pihak perguruan tinggi merasa bahwa lulusan Sekolah Menengah belum memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, (4) adanya gejala lulusan SLTP dan Sekolah Menengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka ini menjadi penganggur.¹¹

Di kasus lain, beberapa waktu lalu sistem pendidikan Indonesia menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA dengan menerapkan soal-soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*). Dilansir oleh detik.com, pembelajaran HOTS mulai mengemuka sejalan dengan adanya penyempurnaan perubahan standar proses dan penilaian pada kurikulum 2013. Standar proses diarahkan pada pencapaian kompetensi abad ke-21 yang terdiri dari kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pada konteks ini, soal HOTS merupakan tuntutan kurikulum agar siswa memperoleh keterampilan berpikir sesuai dengan perkembangan zaman.¹² Dari pengembangan soal HOTS yang diterapkan dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA, terdapat masalah dalam

¹¹ Tim Broad-Based Education, (2002) *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (life Skill) Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Bases Education-BBE)*, Jakarta Depdiknas

¹² <https://news.detik.com/kolom/d-3982056/un-soal-hots-dan-kompetensi-guru> (diakses pada 25 Agustus 2018, pukul 11:41)

beberapa aspek, diantaranya adalah perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Dari segi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, pertanyaannya adalah apakah guru merencanakan pembelajaran HOTS atau tidak? Ada atau tidaknya pembelajaran HOTS dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ketiga hal tersebut dapat dilihat dari perangkat pembelajaran guru berupa Rencana Program Pembelajaran (RPP). Setelah dilakukan penelusuran, menurut Bagus Mustakim, Instruktur Nasional Kurikulum PAI dan Budi Pekerti pada Direktorat PAI Dirjen Pendis Kemenag, ketika ia melakukan pendampingan implementasi kurikulum 2013, baik sebagai instruktur nasional maupun pengawas sekolah, mayoritas guru belum mampu merencanakan dan mengembangkan pembelajaran HOTS. Alih-alih pembelajaran HOTS, banyak guru yang belum mampu memahami konsep kurikulum 2013, bahkan konsep dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pun belum dipahami secara baik. Tidak sedikit guru yang tidak memahami dimensi proses berpikir pada kompetensi dasar sehingga tidak mampu memetakan antara soal HOTS dan tidak HOTS. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi dasar HOTS

menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) HOTS. Berdasarkan analisis tersebut, akar permasalahannya adalah ketidakmampuan guru dalam merencanakan dan mengembangkan pembelajaran HOTS. Ketika guru tidak mampu melaksanakan pembelajaran HOTS, hal itu akan berimbas kepada ketidakmampuan peserta didik menyelesaikan soal HOTS. Walaupun berbagai pelatihan sudah dilakukan untuk guru, tetapi guru masih belum mengimplementasikan dengan baik. Terdapat berbagai macam faktor yang menguat kenapa hal itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena tidak adanya pengawasan yang efektif dan pendampingan yang berkelanjutan pada guru setelah mengikuti pelatihan. Ada kesenjangan yang sangat tajam antara kurikulum dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya. Kurikulum sudah mengalami perubahan yang cepat dan substantif, namun cara pandang dan metode belajar yang dilakukan guru tidak mengalami perubahan. Hal ini yang menyebabkan peserta didik tidak mampu mengerjakan soal ujian dengan standar nasional. Beberapa informasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum memadai. Komponen utama yang harus dibenahi saat ini adalah kompetensi guru. Guru mengalami berbagai kesulitan dan kendala dalam memenuhi segala tuntutan yang ada. Kesenjangan antara

kondisi aktual guru dengan standar kompetensi yang dicapai perlu dicari tahu kebenarannya.

SMA Negeri 59 Jakarta merupakan salah satu sekolah yang terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah dan kepala bidang kurikulum, terdapat beberapa data yang ditemukan, yaitu ada 12 guru yang belum tersertifikasi. Dua belas guru tersebut terdiri dari 9 guru honorer dan 3 guru CPNS. Sedangkan guru yang sudah tersertifikasi terdiri dari 36 guru PNS dan CPNS. Dari penjelasan yang diberikan kepala sekolah, hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) pada tahun 2015, SMA Negeri 59 Jakarta menduduki kelompok 25% terbawah di DKI. Kepala sekolah berpendapat, hal ini terjadi karena formasi guru di SMA Negeri 59 Jakarta sudah ditentukan oleh pusat yang bersifat *giving* atau pemberian. Terlebih lagi, adanya sistem rotasi guru, sehingga kondisi guru di SMA Negeri 59 Jakarta seperti ini adanya. Dalam kasus ini, dari 48 guru di SMA Negeri 59 Jakarta, terdapat 18 guru yang belum dirotasi. Guru yang belum dirotasi merupakan guru senior. Menurut kepala bagian kurikulum, berdasarkan hasil UKG tahun 2015, mayoritas guru SMA Negeri 59 Jakarta mendapatkan hasil yang kurang memuaskan pada aspek kompetensi pedagogik. Hal ini disebabkan karena guru tidak bisa

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan. Selain itu, tidak adanya persiapan yang matang sebelum melaksanakan UKG. Pelaksanaan UKG dilakukan secara mendadak tanpa adanya penyuluhan yang diberikan oleh dinas dan pihak sekolah kepada guru-guru. Dari hasil UKG tahun 2015, kemudian SMA Negeri 59 Jakarta melakukan perbaikan/remedial. Perbaikan UKG tersebut dilakukan dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas untuk guru-guru yang mendapatkan nilai UKG dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Walaupun sudah melakukan perbaikan UKG dan memberikannya kepada Pusdatikomdik, data tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Hal ini patut dipertanyakan, mengapa SMA Negeri 59 Jakarta tetap menduduki kelompok 25% terbawah tingkat DKI sedangkan upaya perbaikan sudah dilaksanakan. Jika melihat dari peringkat tersebut, hal ini menandakan bahwa guru-guru di SMA Negeri 59 Jakarta belum memenuhi standar kompetensi, khususnya kompetensi pedagogik.

Belum terpenuhinya standar kompetensi guru di SMA Negeri 59 Jakarta juga terlihat dari masalah-masalah yang terjadi pada guru. Sebagai contoh, guru mempunyai sejumlah tekanan atau desakan yang kuat untuk memenuhi tuntutan profesi yang sangat tinggi, guru kurang menguasai materi pelajaran, guru belum bisa mengelola kelas

dengan baik, dan terdapat guru yang suka meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung. Pada pembelajaran di kelas, guru-guru hanya sekedar menyampaikan materi kepada peserta didik, cenderung pasif, dan tidak menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Kepala sekolah menambahkan, masalah lainnya adalah terdapat guru yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan mata pelajaran yang diajarkan, yaitu guru sejarah. Guru sejarah tersebut memiliki latar belakang pendidikan PKN, namun mendapatkan SK dari dinas untuk mengajar mata pelajaran Sejarah. Hal ini mengakibatkan, guru kurang mampu mengelola pelajaran sejarah dengan baik. Tidak hanya itu, SMA Negeri 59 Jakarta juga kekurangan guru di mata pelajaran sejarah, matematika, dan PKN. Maka, untuk menyasati kekurangan tersebut, kepala sekolah menugaskan guru agama dan guru olahraga untuk mengajar dua mata pelajaran. Guru agama ditugaskan mengajar mata pelajaran PKN dan guru olahraga ditugaskan mengajar mata pelajaran sejarah.

Berdasarkan penjelasan kepala sekolah mengenai kondisi guru di SMA Negeri 59 Jakarta, dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar guru disini sangat pasif dan tidak terlalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Jika tidak ada tuntutan dari pihak sekolah, guru-guru tidak melakukan upaya apapun. Mungkin, ada beberapa guru di SMA

Negeri 59 Jakarta yang mau terus belajar, tapi mayoritas belum. Oleh karena itu, pihak sekolah yang harus berinisiatif untuk mengadakan program peningkatan kompetensi guru. Sejauh ini, pihak SMA Negeri 59 Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pengadaan pelatihan, misalnya pelatihan pembuatan soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), pelatihan metode-metode pembelajaran, pelatihan kursus mahir dasar pramuka, pelatihan tentang motivasi, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan di SMA Negeri 59 Jakarta dengan mendatangkan narasumber. Selain pelatihan, terdapat program MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sekolah. Metodenya adalah, guru-guru dengan mata pelajaran sejenis berkumpul untuk membahas kinerja setiap guru. Sebagai contoh, guru-guru mata pelajaran Biologi melakukan MGMP di hari Selasa, membahas target apa yang harus dicapai, kendala apa saja yang dihadapi masing-masing guru, apa saja yang harus diselesaikan, dan lainnya. MGMP dilaksanakan minimal sebulan sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Selain MGMP sekolah, terdapat juga MGMP tingkat Jakarta Timur dan MGMP tingkat DKI.

Menurut kepala sekolah SMA Negeri 59 Jakarta, peningkatan kompetensi guru sangat penting dilakukan, karena jika tidak dilakukan akan berdampak pada nominal TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) guru.

Jika kinerja guru dan hasil UKG buruk, TKD yang diperoleh juga akan menurun. Untuk itu, kinerja guru individu atau kinerja guru secara keseluruhan dalam satu sekolah menentukan nominal TKD yang diperoleh sekolah setiap bulannya. Maka, sudah seharusnya setiap guru selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui program-program yang diadakan oleh sekolah. Sekolah berperan sebagai fasilitator pengadaan program untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun sejauh ini, upaya yang dilakukan pihak SMA Negeri 59 Jakarta hanya sebatas pelatihan dan mengandalkan MGMP yang sudah berjalan. Pihak sekolah hanya berorientasi pada apa yang sekiranya belum dipahami oleh guru-guru kemudian dibuat pelatihan yang cocok untuk mereka tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan, pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan, tidak berjalan dengan efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Maka dari itu, perlu adanya program yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi guru di SMA Negeri 59 Jakarta.

Melihat kondisi guru dan mengingat perlunya peningkatan kompetensi guru di SMA Negeri 59 Jakarta, maka tujuan dari penelitian ini adalah membantu pihak sekolah melakukan analisis kebutuhan berbasis standar kompetensi untuk meningkatkan kompetensi guru. Analisis kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian

ini difokuskan pada kompetensi pedagogik karena mengingat kompetensi ini yang paling rendah dibandingkan dengan kompetensi lainnya berdasarkan hasil UKG tahun 2015. Selain itu, menurut kepala sekolah SMA Negeri 59 Jakarta, kompetensi ini paling dibutuhkan oleh guru karena berkaitan erat dengan pembelajaran di kelas. Burton dan Merrill mengemukakan analisis kebutuhan sebagai berikut:

“Systematic process for determining goals (“What do you want?” or “goal state”), identifying discrepancies between these goals and the status quo (“what do you have?” or “initial state”), and establishing priorities for action.”¹³

Berdasarkan definisi tersebut, analisis kebutuhan merupakan proses sistematis untuk menentukan tujuan dengan mengidentifikasi kesenjangan yang ada, kemudian melakukan berbagai upaya/solusi/intervensi dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Sejalan dengan penelitian ini, analisis kebutuhan dilakukan dengan mencari dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi pada guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik. Setelah kesenjangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan intervensi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Intervensi yang dihasilkan dapat menjadi referensi untuk sekolah dalam menentukan atau mengembangkan program peningkatan kompetensi guru. *Output* dari penelitian ini adalah deskripsi analitis yang berisi data kondisi

¹³ Leslie J. Briggs, *Instructional Design: Principles and Applications* (New Jersey: Educational Technology, 1991), hal. 18.

kinerja aktual guru dalam memenuhi setiap indikator kompetensi pedagogik, kesenjangan kinerja antara kondisi ideal dan aktual kompetensi pedagogik guru, serta rekomendasi intervensi yang tepat dalam upaya meningkatkan kompetensi guru SMA Negeri 59 Jakarta. Kegiatan analisis kebutuhan ini merupakan salah satu implementasi dari konsentrasi teknologi kinerja yang terpusat pada peningkatan kinerja manusia. Menurut Organisasi Profesi ISPI (2005) teknologi kinerja seperti:

A systematic approach to improving productivity and competence, uses a set of methods, and procedures-and a strategy for solving problems-for realizing opportunities related to the performance of people.¹⁴

Definisi tersebut memiliki pengertian bahwa teknologi kinerja merupakan proses sistematis yang bertujuan meningkatkan produktivitas kinerja manusia dengan menggunakan seperangkat metode, prosedur, serta strategi dalam memecahkan masalah kinerja yang ada. Sesuai dengan kajian Teknologi Pendidikan yang memiliki definisi (AECT, 2004) sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan mengelola sumber-sumber teknologis dan proses-proses teknologis yang sesuai¹⁵, penelitian ini

¹⁴ *Ibid*, hal. 162.

¹⁵ *Ibid*, hal. 121.

dilakukan dengan harapan dapat membantu pihak SMA Negeri 59 Jakarta melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan intervensi yang tepat dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa indikator yang harus dimiliki guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik?
2. Apa kesenjangan yang ditemukan pada guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pada guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan SMA Negeri 59 Jakarta dalam pemenuhan kompetensi pedagogik guru?
5. Apa intervensi yang tepat diberikan kepada guru SMA Negeri 59 Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pedagogik?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah diatas, penelitian ini dibatasi dengan menentukan dan memberikan rekomendasi intervensi

yang tepat kepada guru SMA Negeri 59 Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pedagogik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan dari penelitian ini adalah “Apa intervensi yang tepat diberikan kepada guru SMA Negeri 59 Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pedagogik?”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menentukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pedagogik berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan yang terjadi pada guru SMA Negeri 59 Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai referensi dan sumber bacaan bagi peneliti dan peneliti lain dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

- b. Sebagai referensi dan sumber bacaan dalam kawasan penilaian Teknologi Pendidikan, khususnya peminatan Teknologi Kinerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, kegiatan penelitian memberikan pengalaman nyata sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis, mengolah data, dan menulis dengan baik.
- b. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 59 Jakarta, hasil penelitian dapat digunakan sebagai data untuk membuat kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja guru secara efektif dan efisien.
- c. Bagi guru SMA Negeri 59 Jakarta, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui kinerja masing-masing dan meningkatkan kinerja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
- d. Bagi mahasiswa/i Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, hasil penelitian dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai penelitian analisis kebutuhan (*needs analysis*).